

# Dakwah Hamka Menjawab Isu-Isu Kenegaraan dalam *Tafsir Al-Azhar*

**Akmal R. G. Hsb\***  
Universitas Islam 45 Bekasi  
Email: [akmalgunawangulen@gmail.com](mailto:akmalgunawangulen@gmail.com)

**Agustina\***  
Universitas Islam 45 Bekasi  
Email: [ummuazza19@gmail.com](mailto:ummuazza19@gmail.com)

## Abstract

This article explains that Buya Hamka was an Indonesian interpreter who had a major influence on efforts in grounding state values. This paper confirms that the discourse on state issues in Hamka's perspective has a selective and accommodating impression. For example, in the context of religious and state relations, he was more inclined to Husein Muhammad Haikal's opinion which is said that in Islam there is a set of principles, moral and ethical values related to the life of society and the state. Whereas in its implementation, Islam does not determine the standard system of government, but Islam has the right to determine the system to be used. As for the state ideology, there were found the difference in Hamka's thinking, a kind of development or shift in Hamka's attitude. On the one hand, Hamka wants an ideology of Islam in Indonesia, while on the other hand, he recognizes Pancasila as a state ideology. It is not another due in around the fifties, Muslims suspected with so many interpretations and differences of interpretation concerning the Pancasila as the State ideology, moreover, the interpretation of the secular group. The approach used in this study is an interpretive approach in order to understand a figure's thoughts/interpreters through their works.

**Keywords:** Hamka, State Issues, Tafseer Al-Azhar, Islam, Ideology

---

\* Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Jalan Cut Mutia Raya No. 83, Margahayu, Bekasi Timur, Margahayu, Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113. Telp. (+6221) 8808853.

## Abstrak

Artikel ini memaparkan bahwa Buya Hamka (1908-1981) adalah salah seorang tokoh tafsir Indonesia yang punya pengaruh besar terhadap upaya pembumian nilai-nilai kenegaraan. Tulisan ini menegaskan bahwa wacana isu-isu kenegaraan menurut Hamka memiliki kesan selektif dan akomodatif. Seperti misalnya, konteks hubungan agama dan negara, Hamka lebih cenderung kepada pendapat Muhammad Husein Haikal, yang mana dikatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Islam tidak menentukan sistem pemerintahan baku, akan tetapi Islam berhak menentukan sistem yang akan digunakan. Adapun mengenai ideologi negara, ditemukan adanya perbedaan dalam pemikiran Hamka, semacam perkembangan atau pergeseran sikap Hamka. Di satu sisi Hamka menginginkan Indonesia berideologi Islam, sedangkan di sisi lain ia mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Hal tersebut tidak lain dikarenakan pada sekitar tahun lima puluhan, umat Islam curiga dengan banyaknya penafsiran dan perbedaan penafsiran mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, terlebih lagi penafsiran dari kelompok sekuler. Adapun pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan interpretasi dalam rangka memahami pemikiran seorang tokoh/mufasir melalui karya-karyanya.

**Kata Kunci:** Hamka, Isu-Isu Kenegaraan, Tafsir Al-Azhar, Islam, Ideologi.

## Pendahuluan

Berbicara tentang negara, memang pada dasarnya al-Qur'an tidak menetapkan konsep negara dan sistem pemerintahan tertentu. Namun demikian bukan berarti konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam al-Qur'an, karena secara substantif terdapat sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Kenyataan inilah yang akhirnya menimbulkan keanekaragaman penafsiran terhadap nas-nas al-Qur'an yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan.<sup>1</sup> Di satu sisi ada yang berpandangan secara tekstual dan di sisi lainnya berpandangan kontekstual.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muchlis M. Hanafi, ed., *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Al-Qur'an dan Kenegaraan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), 50.

<sup>2</sup> Shahzadi Pakeeza dan Ali Asghar Chishti, "Critical Study of Approaches to the Exegesis of the Holy Qur'an" *Pakistan Journal of Islamic Research*, Vol. 10 (2012): 23-24.

Seperti Quraish Shihab,<sup>3</sup> Munawwir Syadzali,<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid,<sup>5</sup> Sirojuddin Aly,<sup>6</sup> Nurcholish Madjid,<sup>7</sup> Khaled M. Abou El-Fadl,<sup>8</sup> Azyumardi Azra,<sup>9</sup> Masdar F. Mas'udi,<sup>10</sup> Komaruddin Hidayat,<sup>11</sup> Masykuri Abdillah,<sup>12</sup> Mahfud MD,<sup>13</sup> Haedar Nashir,<sup>14</sup> yang berpandangan bahwa nilai dan norma agama bisa dikembangkan walaupun tanpa wadah negara Islam secara formal. Karenanya, negara yang dibangun umat Islam tidak harus berdasarkan ideologi Islam, tapi dapat pula berdasarkan yang lain, semisal nasionalisme, atau paham kebangsaan yang memuat nilai substantif ajaran Islam, yaitu mencapai kemerdekaan dan memakmurkan kehidupan bangsa.

Pada sisi lain, pernyataan tersebut berbeda dengan pandangan sebagian kelompok lainnya, seperti: Maududi,<sup>15</sup> Muhammad Nasir,<sup>16</sup> Ja'far Umar Thalib,<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi,<sup>18</sup> Ladan Boroumand

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan: 1997).

<sup>4</sup> Munawwir Syadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, ed. Iqbal Abdurrauf Saimima, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), 1-11.

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam", dalam *Islam Menatap Masa Depan*, ed. Muntaha Ashari dan Abd. Mun'im Saleh, (Jakarta: P3M, 1989), 81-96.

<sup>6</sup> Sirojuddin Aly, "Pancasila: Satu Kajian Analisis dari Perspektif Islam", *Disertasi*, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001), 362.

<sup>7</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Mizan, 2014), 207.

<sup>8</sup> Lihat ulasan Zuhairi Misrawi, "Dialektika Islamisme, Khilafah, dan Syariat", dalam *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*, ed. Komaruddin Hidayat, (Bandung: Mizan, 2014), 82.

<sup>9</sup> Lihat ulasan Azyumardi Azra, "Khilafah dan Indonesia: Relevansi dan Deperkusasi", dalam *Kontroversi Khilafah...*, ed. Komaruddin Hidayat, 233.

<sup>10</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Persepektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), viii.

<sup>11</sup> Komaruddin Hidayat, ed, *Kontroversi Khilafah...*, ix.

<sup>12</sup> Masykuri Abdillah, "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam, Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern", *Jurnal Afkar* No. 7, (2000): 74.

<sup>13</sup> Lihat ulasan Mahfud MD, "Jiwa Syariat dalam Konstitusi Kita", dalam Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945...*, XVIII.

<sup>14</sup> Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 12.

<sup>15</sup> Abu Al Maududi, "Political Theory of Islam" dalam *Islamic Law and Constitution*, ed. Khurshid Ahmad, (Lahore: Islamic Publication, 1967), 243.

<sup>16</sup> Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, *Islam di Ruang Publik...*, 96.

<sup>17</sup> Asrori S. Karni, *Hujatan Demokrasi: Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Simpul Islam Indonesia dari Moderat hingga Garis Keras*, (Jakarta: PT Era Media Informasi, 2006), 163-164.

<sup>18</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islâm*, 3rd Edition, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2001), 61.

dan Roya Boroumand,<sup>19</sup> Esham El-Eryan,<sup>20</sup> Ismail Yusanto,<sup>21</sup> yang berpandangan bahwa nilai dan norma Islam tidak bisa dikembangkan tanpa formalisasi syariat Islam. Karena sejatinya Islam tidak mengenal adanya pemisahan (disparitas) antara yang profan dan sakral (negara dan agama).<sup>22</sup>

Sebuah disertasi tentang gerakan “Islam Syariat” yang ditulis oleh Haedar Nashir untuk meraih gelar Doktor di Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada pertengahan 2006 lalu menyebutkan, bahwa sampai kini masih ada sekurang-kurangnya tiga gerakan resmi yang bersifat terbuka memperjuangkan formalisasi syariat Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi yang secara terbuka memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) memperjuangkan berlakunya hukum Islam menjadi hukum nasional tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam; dan Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan memilih jalan realitas dengan memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui berbagai peraturan daerah (Perda) dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah yang dibuka secara luas.<sup>23</sup>

Lebih parahnya lagi, doktrin yang terkait dengan negara Islam dapat dilihat dari kelompok NII,<sup>24</sup> yang berpandangan bahwa negara Republik Indonesia (NKRI) yang didirikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 dengan menggunakan dasar Pancasila adalah negeri batil. Sedangkan negeri yang hak (benar) menurut mereka adalah

---

<sup>19</sup> Ladan Boroumand dan Roya Boroumand, “Terror, Islam, and Democracy”, *Journal of Democracy*, Volume 12, 2, April 2002: 2.

<sup>20</sup> Esham El-Eryan, *Al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Dawlah al-Madaniyyah*, (Kairo: Markaz al-‘Ilâm al-‘Arabiy, 2011), 4.

<sup>21</sup> Asrori S. Karni, *Hujatan Demokrasi...*, 286.

<sup>22</sup> Masykuri Abdillah, “Gagasan dan Tradisi...”, 74.

<sup>23</sup> Lihat ulasan Mahfud MD, “Jiwa Syariat dalam Konstitusi Kita”, dalam Masdar Farid Mas’udi, *Syarah UUD 1945*, XVIII.

<sup>24</sup> Negara Islam Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945 adalah sebuah gerakan kelompok Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam dengan visi membangun negara seperti yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah. Sebab negara Madinah dianggap prototipe negara ideal untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berperadaban tinggi. Karenanya, menurut mereka, umat Islam tidak layak hidup dalam tatanan pemerintahan kafir atau paling tidak dalam tatanan negara yang diadopsi dari sistem kafir. Lihat Felix Heiduk, “Between a Rock and Hard Place: Radikal Islam in Post-Soeharto Indonesia”, *International Journal of Conflict and Violence*, Vol. 6 (1) (2012): 30.

negara yang didirikan Kartosoewirjo 17 Agustus 1949 dengan nama Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA-NII). Maka seorang Muslim yang sudah berbaiat wajib hijrah baik jasmani maupun rohani ke dalam NII tersebut dan meninggalkan NKRI. Konsekuensi dari hijrah bahwa seorang Muslim haruslah berjihad, baik dengan harta maupun dengan nyawanya, demi tegaknya negara Islam.<sup>25</sup>

Menanggapi diskursus di atas, kajian tafsir diprioritaskan karena al-Qur'an selalu dijadikan dasar pertama dan utama dalam wacana keislaman. Hal ini membuktikan bahwa al-Qur'an mampu menjawab tantangan zaman.<sup>26</sup> Meskipun pada dasarnya al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail terhadap sistem-sistem sosial kehidupan dan tidak memuat dengan detail hukum sosial, melainkan sebuah kitab yang mengandung prinsip-prinsip dasar dan moralitas kemanusiaan universal.<sup>27</sup> Sebagaimana yang tertulis dan dapat dipahami dari firman-Nya yang artinya: "Ini adalah sebuah kitab (al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan (tadabur) ayat-ayat, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran" (QS. Sad [38]: 29).

Dari banyak tokoh tafsir Indonesia, Hamka termasuk yang aktif sebagai negarawan. Terbukti dalam sidang Konstituante (1955-1957), Hamka bersama tokoh-tokoh Masyumi lainnya turut terlibat dalam bentangan panjang proses diskursif menyangkut relasi Islam dan Pancasila. Ambiguitas tokoh-tokoh Islam dalam memandang Pancasila tercemar lewat karya-karya Hamka tentang hal itu. Di satu sisi, ia menginginkan Islam sebagai ideologi negara.<sup>28</sup> Bahkan, dalam berpolitik Hamka terkesan tegas. Pandangannya sama dengan Mohammad Nasir, bahwa dasar negara Indonesia semestinya bukan Pancasila, melainkan Islam. "Islam adalah dasar yang asli tanah air kita dan pribadi sejati bangsa Indonesia", tegasnya. Ia menambahkan, sejak abad 19 perjuangan umat Islam untuk kemerdekaan adalah

<sup>25</sup> Syofyan Hadi, "Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah dalam Konstruksi Negara Islam", dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* Vol. 2, No. 1 (July-Desember 2012): 93. Uraian lebih detail lihat Asep Zainal Ausop, *Ajaran dan Gerakan NII KW IX & Ma'had al-Zaytun*, (Bandung: Tafakur, 2011), 113-148.

<sup>26</sup> Bustami Mohamed Khir, "The Qur'an and Science: The Debate on Validity of Scientific Interpretations", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol 7, No. 1 (2005): 1-32.

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *al-Qur'an dalam Arus Globalisasi dan Modernitas*, (Banten: Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi LPSI, 2004), 3.

<sup>28</sup> Ulya, "Hubungan Kekuasaan-Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr QS. An-Nisa' (4): 59 Pada Tafsir Al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia 1955-1966", *Disertasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 270.

dilatarbelakangi oleh perjuangan untuk menegakkan suatu negara berdasarkan Islam. Itulah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Mereka semuanya berjuang mengusir kolonial Belanda dengan satu tujuan: mewujudkan cita-cita negara berdasarkan Islam. “Kamilah yang meneruskan wasiat mereka”, kata Buya Hamka menyimpulkan.<sup>29</sup>

Menariknya, di sisi lain sebagian kalangan mengakui bahwa Hamka menerima nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang sejalan dengan prinsip-prinsip substantif moral publik keislaman. Hal ini terbukti pada penjelasannya tentang Urat Tunggang Pancasila. Di mana beliau menyimpulkan, “Pancasila telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sejak seruan Islam sampai ke Indonesia dan diterima bangsa Indonesia. Kita tak usah kuatir Pancasila terganggu, selama urat tunggangnya masih tetap kita pupuk, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>30</sup> Melihat fenomena di atas, lewat tulisan singkat ini penulis mencoba merespons sejauh manakah kontribusi Hamka menjawab isu-isu kenegaraan dalam tafsirnya *Al-Azhar*?

### Rihlah Dakwah Hamka dalam Beragama dan Bernegara

Harus diakui, bahwa sejauh ini sosok Buya Hamka bagi banyak pembacanya dikenal sebagai agamawan dan negarawan sejati. Setiap dinamika kehidupan beliau selalu membawa sentuhan manis bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya, termasuk ketika menyampaikan dakwah *bi al-lisân* (lisan), dakwah *bil al-kitâbah* (tulisan), serta dakwah *bi al-hâl* (perbuatan) yang tegas, sejuk dan damai. Salah satu peran vital Buya Hamka yang tak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia adalah saat beliau mampu menjadi sosok mediator antara umat dengan pemerintah. Saat itu dirinya menjadi anggota Dewan Konstituante RI perwakilan Masyumi. Buya Hamka menjadikan organisasi tersebut sebagai jembatan untuk membuka

<sup>29</sup> Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 89. Pandangan Islam terhadap dasar negara dapat dibaca dalam karya Hamka, *Islam sebagai Dasar Negara: Pidato di depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)*, (Bandung: Segarsy, 2004). Ulasan seputar polemiknya dengan Presiden Soekarno mengenai negara Islam, lihat Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2002). Lihat juga Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001), 105.

<sup>30</sup> Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam...*, 165.

ruang komunikasi umat dengan negara, sehingga banyak hal yang bisa dirasakan oleh umat berkaitan dengan kepentingan mereka dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Dalam dakwah *bi al-lisân* misalnya, ketika berpidato dalam peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di istana negara, Buya Hamka mengatakan di akhir pidatonya, "Saya menerima Pancasila, sebab saya ini seorang Muslim". Alasan penerimaan ini dikarenakan sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Percaya kepada kekuasaan Tuhan merupakan dasar utama bagi seorang Muslim, dan kepercayaan itulah sebagai dasar terpeliharanya Pancasila. Hamka bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan pada negara Indonesia, kemerdekaan yang didapatkan tidak lain karena rahmat Tuhan. Namun, sebagai seorang Muslim ia tidak mungkin meletakkan Pancasila di urutan nomor satu di atas Islam, meski demikian, ia akan berusaha hidup sebagai Muslim sejati, disertai dengan keyakinannya untuk menjadi Pancasilais sejati.<sup>31</sup>

Begitu pula halnya dalam dakwah *bi al-ḥâl*. Kendati rezim Soekarno menjebloskannya ke penjara atas tuduhan fitnah makar yang tak pernah dilakukannya sama sekali, namun ia tetap mengambil hikmah di dalamnya dengan menghabiskan waktu menulis kitab tafsir *Al-Azhar*. Bahkan, kebesaran hati Buya Hamka pada Bung Karno ia tunjukkan ketika Proklamator Republik Indonesia itu wafat pada 21 Juni 1970. Hamka tiba-tiba dijemput oleh Mayjen Soeryo, ajudan Presiden Soeharto, yang mengabarkan bahwa Soekarno telah wafat. Ia membawa pesan untuk Hamka dari Soekarno yang memintanya menjadi imam salat jenazah. Menariknya, tanpa berpikir panjang Hamka segera meluncur ke Wisma Yaso. Dengan mantap Hamka menjadi imam salat jenazah Bung Karno, meski beliau pernah dipenjara oleh Soekarno.<sup>32</sup>

Mengenai dakwah dalam *bi al-kitâbah*, Hamka dipandang sebagai seorang penulis produktif di masanya, bahkan mungkin di masa-masa berikutnya. Karyanya yang mencapai 113 buku, baik kecil

---

<sup>31</sup> Kutipan dari ungkapan Hamka mengenai keabsahan Pancasila sebagai dasar negara ini, dapat dijumpai dan dilihat pada penutup atau bagian akhir dari salah satu buku yang ditulis oleh Hamka, *Studi Islam*. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Panji Mas, dan mengalami dua kali cetak, yaitu pada tahun 1982 dan tahun 1983, berisi sebanyak 291 halaman. Lihat, Hamka, *Studi Islam*, ed. Rusydi, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) 290.

<sup>32</sup> Irfan Hamka, *Ayah; Kisah Buya Hamka, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya*, (Jakarta: Republika, 2013), 255.

maupun besar, tidak termasuk naskahnya yang belum diterbitkan.<sup>33</sup> Kecintaan Buya Hamka dalam menulis dapat dilihat dari banyak karya beliau yang terbit semenjak Orde Baru. Belum lagi ribuan tulisan beliau dalam bentuk buletin atau opini di berbagai majalah dan surat kabar. Adapun yang menjadi *magnum opus*-nya adalah *Tafsir Al-Azhar*. Dalam tafsir ini memuat pesan dakwah Hamka tentang isu-isu kenegaraan seperti uraian berikut.

### Agama dan Negara dalam *Tafsir Al-Azhar*

Dalam konteks hubungan antara agama (Islam) dan negara, Hamka mengatakan bahwa ketika Islam dipelajari secara mendalam, maka dalam Islam tidak ditemukan adanya istilah pemisahan agama dan negara,<sup>34</sup> di mana agama dianggap sebagai urusan atau persoalan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan duniawi, serta memisah dan tidak mencampuradukkan persoalan agama di dengan persoalan dunia.<sup>35</sup>

Hamka tidak setuju dengan ungkapan bahwa “Islam adalah agama dan negara”. Ungkapan ini beranggapan bahwa pendirian sistem kekhalifahan merupakan tugas utama bagi semua umat Islam, dan bagi siapapun yang mengabaikan tanggung jawab akan tugas ini, maka mereka telah melakukan perbuatan berdosa. Kelompok ini menentang dan tidak menerima hukum yang dibuat manusia. Sedangkan yang tepat menurutnya adalah “Islam adalah agama”, yang berarti di dalam Islam terdapat rumusan syariat yang terdiri dari tujuh bagian. Mengurus negara merupakan salah satu dari cabang syariat dalam agama Islam.<sup>36</sup> Al-Qur’an pada dasarnya tidak menentukan sebuah bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu, akan tetapi al-Qur’an lebih menekankan bahwa negara dan pemerintahan merupakan sarana dalam merealisasikan ajaran-ajaran Islam bagi kehidupan manusia.<sup>37</sup> Pernyataan Hamka ini berbeda dengan konsep al-Hakimiyah atau konsep pemerintahan Islam yang didengungkan al-Maududi, Sayyid Qutb, dan Rasyid Ridha di awal abad kedelapan belas.<sup>38</sup> Mereka

<sup>33</sup> Qosim Nursheha Dzulhadi, *Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, (Medan: Litbang Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, 2016), 11.

<sup>34</sup> Hamka, *Studi Islam*, 30.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 196.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 205-210.

<sup>37</sup> Muchlis M. Hanafi, ed., *Tafsir Al-Qur’an...*, 50.

<sup>38</sup> Lihat, Fred Halliday. “The Politics of ‘Islam’”, *British Journal of Political Science*,



menyatakan bahwa Islam merupakan sebuah pola hidup yang lengkap dengan aturan-aturan dalam aspek kehidupan, termasuk politik. Hamka tampak sepekat dengan pendapat Husain Haikal yang menyatakan bahwa di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun dalam pelaksanaannya Islam berhak memilih salah satu sistem yang akan digunakan.<sup>39</sup>

Hamka mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya sebagai pendiri sebuah agama (Islam), melainkan seorang nabi yang meninggalkan sebuah warisan berupa dokumen untuk membentuk suatu negara yang damai, sejahtera, aman, adil, dan makmur.<sup>40</sup> Walaupun secara khusus Nabi Muhammad tidak meninggalkan pesan tentang bentuk dan susunan kenegaraan, tidak meninggalkan gelar yang dinamakan kepala negara, parlemen, atau majelis tinggi, akan tetapi pesan pokok yang diajarkan al-Qur'an untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat atau jamaah hingga menjadi negara, adalah sebuah konsep yang dinamakan "syura".<sup>41</sup> Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu, setiap negara berhak untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri, sesuai dengan tingkat kecerdasan masyarakatnya. Alasan Hamka ini disandarkan pada dua hal; *pertama* bahwa setiap manusia adalah khalifah, Tuhan memberikan kebebasan berfikir dalam menentukan persoalan dunianya (pemerintahannya). *Kedua*, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menentukan siapa yang menjadi calon penggantinya, persoalan tersebut diserahkan kepada mereka yang masih hidup (para Sahabat). Mereka berhak untuk memilih sistem atau bentuk pemerintahannya sendiri, dan syuralah yang menjadi pedoman, serta prinsip utama dalam menjalankan bentuk pemerintahan tersebut.<sup>42</sup>

Dalam Islam, syura berarti partisipasi berbentuk konsultasi dalam diskusi yang mengarah pada pembuatan keputusan.<sup>43</sup> Adapun tujuan dari pembentukan sebuah pemerintahan menurut Hamka

---

(Juli 1995): 404.

<sup>39</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 205. Bandingkan, Muhammad Husein Haikal, *al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1983), 28-30.

<sup>40</sup> Hamka, *Studi Islam*, 25.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>42</sup> Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, ed. Rusydi, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), 203.

<sup>43</sup> Yasir Majeed dkk, "The Impact of Islamic Leadership on Organizational Objectives", *Far East Journal of Marketing and Management*, Vol.1 (December 2011): 55.

adalah menegakkan keadilan.<sup>44</sup> Dalam pandangannya, negara dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan hukum kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, di mana kebenaran dan keadilan yang mutlak hanyalah milik Allah. Pendapat Hamka ini tampaknya memiliki kemiripan dengan Ibnu Taimiyah yang mendambakan penegakkan keadilan begitu kuat dalam pemerintahan. Bedanya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemimpin yang adil walaupun tidak beragama Islam lebih baik daripada pemimpin yang tidak adil tapi beragama Islam.<sup>45</sup>

Upaya kontekstualisasi<sup>46</sup> ayat al-Qur'an yang dilakukan Hamka melalui penafsiran dan berkaitan dengan istilah negara, juga dapat dijumpai pada penafsirannya mengenai surah al-Balad. Hamka membagi penafsiran surah al-Balad menjadi empat bagian. Bagian pertama terdiri dari ayat 1 hingga ayat 4, bagian kedua terdiri dari penafsiran ayat 5 sampai 10, bagian ketiga terdiri dari ayat 10 hingga 16, dan bagian terakhir terdiri dari ayat 17 hingga akhir ayat 20. Merujuk kepada pendapat al-Qushairi dan jumhur mufasir, Hamka memulai penafsirannya dengan menafsirkan kata demi kata pada ayat pertama dan kedua, yang dimulainya dari arti sumpah (*qasm*). Kemudian memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud kata "*al-balad*", yaitu Kota Makkah. Penafsiran surah ini dijelaskan secara terperinci, dari satu ayat bersambung ke ayat lainnya, sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan hingga akhir ayat.

Dari upaya kontekstualisasi ayat tersebut, yang menarik perhatian adalah ketika Hamka menguraikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam surah al-Balad merupakan dasar perjuangan partai Masyumi yang didengungkan oleh Darwis Taib di Sumatera Barat. Mengutip Taib, Hamka mengatakan bahwa surah al-Balad merupakan dasar dari keadilan sosial yang bersumber dari wahyu. Manusia dididik untuk memperdalam iman dan mampu melewati jalan yang sulit, sanggup mengeluarkan harta benda untuk menghapus perbudakan, pemerasan, memberi makan anak yatim yang ditinggal akibat peperangan atau fakir miskin. Masyarakat Muslim merupakan jamaah atau komunitas

<sup>44</sup> Hamka, *Studi Islam*, 118.

<sup>45</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 89.

<sup>46</sup> Hamka termasuk salah satu kelompok penafsir neo-modernis, tiga ide atau prinsip-prinsip neo-modernis dalam menafsirkan al-Qur'an adalah melibatkan konteks historis ketika ayat al-Qur'an diturunkan, penekanannya lebih kepada etika dan moralitas, menghubungkan al-Qur'an dengan keadaan atau situasi dan kondisi kekinian penafsir. Lihat, Carool Kersten, "Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia by Abdullah Saeed", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 69 (2006): 500.

yang hidup gotong royong dalam kesabaran. Semua itu tidak lain adalah buah dari iman dan keyakinan hidup sebagai seorang Muslim.<sup>47</sup>

Ia menjelaskan akan ungkapan kewaspadaan Taib, bahwa dalam dinamika politik Indonesia, akan tiba masa di mana kaum tidak terdidik dari kalangan Islam yang mengikuti paham Komunis dan Nasionalis, akan berusaha menyingkirkan Islam dari arena perjuangan politik walaupun secara curang. Karena menurutnya, setiap agenda politik yang tidak bersandarkan pada agama akan menggunakan kecurangan sebagai jalan dalam mencapai tujuan politiknya, yaitu kekuasaan. Jika politik Islam ingin menang, maka pemahaman akan politik Islam harus ditanamkan dan dimulai dari sebuah kelompok atau jamaah kecil di surau-surau, dengan imamnya yang merangkap menjadi seorang pemimpin.<sup>48</sup>

Dari ungkapan Taib itulah, menurut Hamka, perjuangan politik Masyumi berawal dan akhirnya membuahkan hasil, bahwa Masyumi dapat menempatkan kadernya sebanyak tiga kali dalam kursi Perdana Menteri dan dua kali menjadi Wakil Perdana Menteri. Hamka menilai keberhasilan itu yang akhirnya menjadikan alasan dibubarkannya partai Masyumi. Terlepas dari itu, semangat juang dan nilai-nilai yang lahir dari surah al-Balad sebagaimana disampaikan oleh Darwis Taib, akan selalu dikenang dan menjadi inspirasi perjuangan generasi pada masa selanjutnya.<sup>49</sup>

Penilaian Hamka ini terlihat sangat politis, sebab keaktifannya dalam partai Masyumi,<sup>50</sup> di mana ia pernah duduk dalam kursi parlemen tahun 1955 sebagai salah satu wakil dari partai itu, dan pada saat yang sama ia juga menjadi Ketua Umum Muhammadiyah.<sup>51</sup> Hamka juga tercatat pernah menolak konsep atau ideologi politik yang dipegang oleh Presiden Sukarno yang berhubungan mesra dengan komunisme.<sup>52</sup> Ia mengatakan, "Soekarno dengan segenap wibawa,

<sup>47</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXX*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2004), 155-170.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 168.

<sup>49</sup> Menurut Hamka, dalam sejarah politik Indonesia, Presiden Soekarno memegang sebuah istilah yang dinamakan "Kabinet Kaki Empat", yaitu koalisi empat partai yang terdiri dari Masyumi, PNI, PKI, dan Nahdlatul Ulama'. Ia meyakini bahwa Masyumi tidak akan pernah mau untuk bekerja sama dengan PKI, maka atas dasar itulah Masyumi disisihkan dari kancah perpolitikan Indonesia. *Ibid.*, 170.

<sup>50</sup> Lihat, Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, 240.

<sup>51</sup> Remy Madinier, *Partai Masjumi; Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, Terj. Tonny Pasuhuk, (Jakarta: Mizan, 2013), 43.

<sup>52</sup> Menurut Munawir Sjadzali, pertarungan yang terjadi di antara Masyumi dan Soekarno dilatarbelakangi oleh ideologi kenegaraan yang berbeda di antara kedua belah

kekuasaan, dan pengaruh yang ada padanya mencoba menolong komunis. Segala siasat tetap diaturnya. Tetapi hasilnya bukanlah komunis saja yang hancur, bahkan kewibawaan Soekarno yang membelanya pun turut dihancurkan oleh Tuhan.”<sup>53</sup>

Selain itu, pernyataan Hamka tersebut menggambarkan akan adanya kekhawatiran dalam dinamika politik Indonesia. Kekhawatiran terhadap konsep dan sistem politik yang berkaitan dengan kenegaraan Indonesia, di mana Hamka sangat menentang dan menolak paham sekularisme yang menurutnya mencoba meninggalkan serta memisah agama dari setiap hal yang berkaitan dengan negara.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan pembahasan kenegaraan berikutnya, Hamka mengungkapkan sanggahannya terhadap pernyataan yang menjelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dipengaruhi oleh Islam. Hal itu dapat ditemukan pada penafsiran ayat 93 sampai ayat 94 surah al-Anbiya’;

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۗ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (٣٩) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (٤٩)

“Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka di antara mereka. Kepada Kami masing-masing golongan itu akan kembali. Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.”

Dalam tafsirnya, Hamka memasukkan ayat 93 dan 94 di atas ke dalam satu topik pembahasan yang diberi judul “Pecah-Belah”. Pada awal penafsiran, ia menjelaskan bahwa kesatuan umat Islam dikarenakan kesatuan akidah, dan manusia dapat menjadi terpecah-belah, porak-poranda, dikarenakan kesatuan tauhid yang hilang dari diri mereka (satu tujuan, yakni Allah).<sup>55</sup> Kemudian, di akhir penutup penafsiran, ia mengutarakan pendapat atau pandangan kaum komunis yang beranggapan bahwa Islam tidak terlibat sedikitpun dalam proses

---

pihak; Masyumi yang diwakili oleh Natsir sebagai ketua umumnya, mengusung ideologi Islam, dan Soekarno yang mengusung ideologi sekuler Mustafa Kemal, mengambil sistem pemerintahan Republik Turki sebagai contoh pemerintahannya. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 191-192.

<sup>53</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar IV*, 175.

<sup>54</sup> Hamka, *Studi Islam*, 207.

<sup>55</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar XVII*, 110.

perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Hamka, ungkapan tersebut lahir atas dasar kebencian mereka dengan Islam dan tidak menginginkan pengaruh Islam tumbuh semakin besar.<sup>56</sup> Pada dasarnya, menurut Hamka, proses atau semangat kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari unsur Islam di dalamnya. Dengan kata lain, hubungan antara agama dan negara memang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan agama dapat dicapai melalui politik, dan atau sebaliknya (kemajuan negara dapat melalui agama), dikarenakan keduanya memiliki hubungan dan timbal balik.<sup>57</sup> Selama umat Islam selalu berpegang pada tauhid, hal tersebut dapat menjaga dan menghindarkan undang-undang dari penyelewengan kekuasaan para penguasa atau pemimpin negara.<sup>58</sup>

### Ideologi Negara dalam *Tafsir Al-Azhar*

Mengenai penafsiran Hamka akan ideologi negara, dapat ditemukan dalam tafsirannya terhadap QS. al-Nisa' ayat 104:

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan, sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Hamka, ayat tersebut harus dipegang teguh oleh umat Islam di zaman modern ini. Ayat ini berisikan perintah untuk menegakkan agama yang benar, yaitu Islam. Ia melanjutkan, bahwa di zaman modern, peperangan yang terjadi bukanlah peperangan layaknya zaman feodal dahulu, peperangan untuk mengorbankan jiwa raga demi seorang raja. Namun, peperangan yang terjadi adalah untuk menegakkan ideologi, baik ideologi Islam, komunis, ataupun kapitalis. Hamka menyindir umat Islam yang dirasa kurang bersemangat dalam

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar XVII*, 111-112.

<sup>57</sup> Rachel Beatty Riedl, “Transforming Politics, Dynamic Religion: Religion’s Political Impact in Contemporary Africa”, *African Conflict and Peacebuilding Review*, Vol. 2 (2012): 31.

<sup>58</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar XVII*, 111.

memperjuangkan dan menegakkan ideologi Islam di Indonesia.<sup>59</sup>

Uraian penafsiran Hamka di atas dapat diartikan sebagai penentangannya terhadap ideologi kapitalis dan komunis yang dikhawatirkan akan merambah di Indonesia. Yang mana sekitar tahun enam puluhan, Hamka dihadapkan pada masa-masa kejayaan PKI, yang program utamanya adalah penghancuran kekuatan Islam dengan berbagai cara, bertujuan untuk menciptakan masyarakat ateis.<sup>60</sup> Persinggungan antara penafsiran dan ulasan seputar ideologi, secara tidak langsung dikarenakan Hamka merupakan salah satu tokoh Islam yang mempertanyakan kelayakan Pancasila sebagai ideologi negara.<sup>61</sup> Pada sekitar tahun 1950-an, meski di Indonesia telah tercapai konsensus mengenai ideologi dan bentuk negara, namun pertempuran ideologi masih terjadi di antara kalangan nasionalis sekuler, Islamis, dan komunis, sehingga membuat kompromi politik sulit untuk dicapai.<sup>62</sup> Karena itu, Hamka memandang pentingnya ideologi Islam dan khawatir terhadap ideologi kapitalis dan komunis yang sekuler, bahkan ateis.

Semangat Hamka dalam memperjuangkan ideologi Islam ini tampaknya berujung pada peristiwa ditangkap dan dipenjarakannya Hamka. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya saat itu adalah melanggar Undang-Undang Anti Subversif Pampres No. 11, yaitu merencanakan pembunuhan Presiden Soekarno.<sup>63</sup>

Kekhawatiran dan penolakan Hamka terhadap berbagai macam ideologi dan konsep politik selain Islam<sup>64</sup> yang akan digunakan di Indonesia juga dapat dijumpai pada penafsirannya mengenai surah al-An'am ayat 159:

<sup>59</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar V*, 333-334.

<sup>60</sup> A. Saikhu, "Hamka; Ulama, Pujangga, Politisi", dalam *Hamka di Mata Hati Umat*, ed. Nasir Tamara dkk, (Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1983), 229.

<sup>61</sup> Hamka termasuk salah satu di antara beberapa tokoh intelektual Indonesia, seperti Hatta, Kasman Singodimedjo, K.H. Masjkur, dan Natsir, yang memberikan pandangan pada prinsip Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rudy de Iongh, "Book Review: Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante [Islam and the Problem of the State: A Study of "Chess" in the Constituent Assembly]. By Ahmed Syafii Maarif. Jakarta: LP3ES, 1985. Pp. xvi, 225.", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 22 (1991): 121.

<sup>62</sup> Dewi Fortuna Anwar, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 (2010): 42.

<sup>63</sup> Lihat, Irfan Hamka, *Ayah...*, 255.

<sup>64</sup> Hamka termasuk salah satu tokoh Islam Modernis dan Masyumi yang banyak mengupas gagasan Negara Islam dan terlibat dalam polemik mengenai dasar negara pada awal kemerdekaan hingga perdebatan di Majelis Konstituante tahun 1957. Adapun beberapa tokoh Islam Modernis dan Masyumi lainnya adalah Agus Salim, Muhammad Natsir, Soekiman, Kahar Muzakkar, Isa Anshari, Kasman Singodimedjo. Lihat, Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 144.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ  
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.”

Dalam tafsirnya, Hamka memasukkan ayat ini ke dalam satu poin pembahasan yang berjudul “Memecah-belah Agama di Zaman Modern”. Menurutya, di zaman sekarang, banyak perubahan-perubahan baru yang menjadi penyebab pecah-belahnya agama Islam, perpecahan tersebut tidak lagi berupa perpecahan golongan atau mazhab, melainkan perpecahan ideologi, seperti Sosialisme, Komunisme, Liberalisme, Pragmatisme, atau Demokrasi. Lanjutnya, orang-orang beragama Islam yang tidak mengetahui atau mempelajari Islam secara mendalam akan melepaskan syariat Islam dan menggunakan salah satu di antara sekian ideologi tersebut bagi kehidupannya. Padahal, Islam bukan hanya agama yang mengatur tentang peribadatan, melainkan bersifat universal yang mengandung syariat, ibadah, muamalat (kemasyarakatan), dan persoalan kenegaraan. Kesemua itu bersumber dari tauhid terhadap Allah. Oleh karena itu, persoalan dalam Islam tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Islam tidak hanya mengatur salat, akan tetapi Islam juga mengatur persoalan kenegaraan.<sup>65</sup>

Mengenai hal ini Hamka memberi penjelasan ketika menafsirkan QS. al-An’am: 130. Penafsiran tersebut berisi sebuah uraian mengenai hubungan negara dan upaya penegakkan syariat Islam di Indonesia. Ayat tersebut adalah sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَفْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ  
يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ  
أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

“Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu

<sup>65</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar VIII*, 150-151.

dengan hari ini? Mereka berkata: 'Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri'. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir."

Di awal penjelasannya terhadap ayat ini, Hamka memulai dengan menjelaskan, bahwa manusia yang terpuakau dengan kehidupan duniawi telah melupakan ajaran-ajaran yang disampaikan para nabi dan rasul, dan melupakan apa yang diajarkan al-Qur'an. Kemudian ia memberikan contoh yang berkaitan dengan perjuangan ideologi Islam atau Islam sebagai sebuah sistem<sup>66</sup> di Indonesia yang dilakukan seseorang. Ia memulai menceritakan bahwa terdapat segolongan umat Muslim yang mendirikan partai berasaskan Islam, cita-cita atau ideologi yang diinginkan adalah agar syariat Islam diterapkan di negara mereka, walaupun negara tersebut bersifat nasional dan condong kepada paham sekuler.<sup>67</sup> Di akhir urainya, Hamka mengisahkan bahwa seseorang yang masuk dalam kursi kementerian yang ada dalam pemerintahan dengan semangat atau cita-cita partai yang dibawanya, pada akhirnya melenceng atau menyeleweng dari tujuan dan cita-cita awalnya dikarenakan jabatan dan kemewahan dunia yang didapatkan.<sup>68</sup> Kemudian, sebagai penutup dalam menafsirkan ayat ke 130 ini, Hamka mengatakan bahwa orang-orang yang pada awalnya bersemangat memperjuangkan ideologi Islam, namun karena kemegahan duniawi cita-cita itu terlupakan, maka mereka telah menjadi kafir, atau termasuk golongan orang-orang kafir.<sup>69</sup>

Uraian penafsiran Hamka yang kental akan nuansa politik, dalam hal ini berkaitan dengan persoalan ideologi negara, tidak lain dikarenakan ia pernah menjabat sebagai anggota konstituante dari fraksi Masyumi yang cukup aktif dalam sidang perumusan dasar negara Republik Indonesia, yang getol memperjuangkan ideologi Islam sebagai dasar negara, yang pada kenyataannya hingga sekarang Islam bukanlah ideologi dan konstitusi negara Indonesia.<sup>70</sup> Hamka bahkan pernah mengatakan; "Bila negara kita ini mengambil dasar

<sup>66</sup> William E. Shepard, "Islam and Ideology: Towards a Typology", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 19 (Agustus 1987): 316.

<sup>67</sup> Menurut William E. Shepard, Indonesia dengan Pancasila merupakan tipe negara bercirikan *religious secularism* (sekularisme agama). *Ibid.*, 309.

<sup>68</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar VIII*, 55.

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar VIII*, 56.

<sup>70</sup> N. Hassan Wirajuda, "The Democratic Response", *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. IX (2002): 19.



negara berdasarkan Pancasila, sama saja kita menuju jalan ke neraka".<sup>71</sup> Akan tetapi, ungkapan tersebut dapat ditepis dengan sendirinya oleh ungkapannya yang menyatakan bahwa Pancasila telah diputuskan bersama sebagai dasar filsafat negara, ia menyatakan "Saya menerima Pancasila, sebab saya ini seorang Muslim". Alasan penerimaan ini dikarenakan sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa, percaya kepada kekuasaan Tuhan merupakan dasar utama bagi seorang Muslim, dan kepercayaan itulah sebagai dasar terpeliharanya Pancasila. Meski demikian, Hamka mengatakan bahwa sebagai seorang Muslim ia tidak mungkin meletakkan Pancasila menjadi urutan nomor satu di atas Islam, melainkan sebaliknya. Ia akan berusaha hidup sebagai Muslim sejati, disertai dengan keyakinannya untuk menjadi Pancasila-lais sejati.<sup>72</sup>

## Penutup

Setelah melakukan kajian terhadap pemikiran politik Hamka berkaitan dengan persoalan kenegaraan, dapat disimpulkan bahwa dalam tema hubungan agama dan negara, pemikiran Hamka lebih cenderung kepada pendapat Muhammad Husein Haikal, yang mana dikatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Islam tidak menentukan sistem pemerintahan baku, akan tetapi Islam berhak menentukan sistem yang akan digunakan. Adapun, mengenai ideologi negara, ditemukan adanya inkonsistensi dalam pemikiran Hamka, semacam perkembangan atau pergeseran sikap Hamka. Di satu sisi Hamka menginginkan Indonesia berideologi Islam, sedangkan di sisi lain, ia mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Hal tersebut tidak lain dikarenakan pada sekitar tahun lima puluhan, umat Islam curiga dengan banyaknya penafsiran dan perbedaan penafsiran mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, terlebih lagi penafsiran dari kelompok sekuler.

Harus diakui, bahwa sejauh ini sosok Buya Hamka bagi banyak pembacanya dikenal sebagai agamawan dan negarawan sejati. Meski

<sup>71</sup> Irfan Hamka, *Ayah...*, 255.

<sup>72</sup> Kutipan dari ungkapan Hamka mengenai keabsahan Pancasila sebagai dasar negara ini, dapat dijumpai dan dilihat pada penutup atau bagian akhir dari salah satu buku yang ditulis oleh Hamka, *Studi Islam*, 290.

aktif di dunia politik, sosok dai dan kewajiban berdakwah tidak ditinggalkannya. Dakwah Hamka ini, baik melalui lisan, tulisan, dan perbuatan, sangat tegas namun tetap terasa damai. Oleh karena itu, beliau mampu menjadi sosok mediator antara komunikasi umat dengan pemerintah, sehingga banyak hal yang bisa dirasakan oleh umat berkaitan dengan kepentingan mereka dalam kehidupan beragama dan bernegara.[]

#### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam, Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern", *Jurnal Afkar* No. 7, (2000): 74.
- Ahmad, Khurshid., ed. *Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1967)
- Aly, Sirojuddin. "Pancasila: Satu Kajian Analisis dari Perspektif Islam", *Disertasi*, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001)
- Anwar, Dewi Fortuna. "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 (2010): 42.
- Artawijaya. *Belajar dari Partai Masjumi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014)
- Ashari, Muntaha., Abd. Mun'im Saleh. eds. *Islam Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989)
- Ausop, Asep Zainal. *Ajaran dan Gerakan NII KW IX & Ma'had al-Zaytun*, (Bandung: Tafakur, 2011)
- Boroumand, Ladan., Roya Boroumand. "Terror, Islam, and Democracy", *Journal of Democracy*, Volume 12, 2, April 2002: 2.
- El-Eryan, Esham. *Al-Ikhwân al-Muslimûn wa al-Dawlah al-Madaniyyah*, (Kairo: Markaz al-'Ilâm al-'Arabiy, 2011)
- Hadi, Syofyan. "Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah dalam Konstruksi Negara Islam", dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* Vol. 2, No. 1 (July-Desember 2012): 93.
- Hafidhuddin, Didin. *al-Qur'an dalam Arus Globalisasi dan Modernitas*, (Banten: Lembaga Pengembangan Studi dan Informasi LPSI, 2004)
- Haikal, Muhammad Husein. *al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1983)
- Halliday, Fred. "The Politics of 'Islam'", *British Journal of Political Science*, (Juli 1995): 404.

- Hamka. *Islam sebagai Dasar Negara: Pidato di depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)*, (Bandung: Segarsy, 2004).
- \_\_\_\_\_. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, ed. Rusydi, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984)
- \_\_\_\_\_. *Studi Islam*, ed. Rusydi, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2004)
- \_\_\_\_\_. dkk. *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001)
- Hamka, Irfan. *Ayah; Kisah Buya Hamka, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya*, (Jakarta: Republika, 2013)
- Hanafi, Muchlis M. ed. *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Al-Qur'an dan Kenegaraan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011)
- Hasan, Noorhaidi., Irfan Abubakar. *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Heiduk, Felix. "Between a Rock and Hard Place: Radikal Islam in Post-Soeharto Indonesia", *International Journal of Conflict and Violence*, Vol. 6 (1) (2012): 30.
- Hidayat, Komaruddin. *Kontroversi Khilafah Islam, Negara, dan Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2014)
- Iongh, Rudy de. "Book Review: Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante [Islam and the Problem of the State: A Study of "Chess" in the Constituent Assembly]. By Ahmed Syafii Maarif. Jakarta: LP3ES, 1985. Pp. xvi, 225.", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 22 (1991): 121.
- Karni, Asrori S. *Hujatan Demokrasi: Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Simpul Islam Indonesia dari Moderat hingga Garis Keras*, (Jakarta: PT Era Media Informasi, 2006)
- Kersten, Carool. "Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia by Abdullah Saeed", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 69 (2006): 500.
- Khair, Bustami Mohamed. "The Qur'an and Science: The Debate on Validity of Scientific Interpretations", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol 7, No. 1 (2005): 1-32.
- Madinier, Remy. *Partai Masjumi; Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, Terj. Tonny Pasuhuk, (Jakarta: Mizan, 2013)

- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Mizan, 2014)
- Majeed, Yasir., dkk. "The Impact of Islamic Leadership on Organizational Objectives", *Far East Journal of Marketing and Management*, Vol.1 (December 2011): 55.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah UUD 1945 Persepektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013)
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013)
- Pakeeza, Shahzadi., Ali Asghar Chishti. "Critical Study of Approaches to the Exegesis of the Holy Qur'an" *Pakistan Journal of Islamic Research*, Vol. 10 (2012): 23-24.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islâm*, 3rd Edition, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2001)
- Qosim Nursheha Dzulhadi, *Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar*, (Medan: Litbang Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, 2016)
- Riedl, Rachel Beatty. "Transforming Politics, Dynamic Religion: Religion's Political Impact in Contemporary Africa", *African Conflict and Peacebuilding Review*, Vol. 2 (2012): 31.
- Saimima, Iqbal Abdurrauf. ed. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988)
- Shepard, William E. "Islam and Ideology: Towards a Typology", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 19 (Agustus 1987): 316.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan: 1997)
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2002)
- Tamara, Nasir. dkk. eds. *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1983)
- Ulya. "Hubungan Kekuasaan-Pengetahuan dalam Pewacanaan Ulu al-Amr QS. An-Nisa' (4): 59 Pada Tafsir Al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia 1955-1966", *Disertasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Wirajuda, N. Hassan. "The Democratic Response", *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. IX (2002): 19.